

**FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PEMBERDAYAAN NELAYAN OLEH  
STAKEHOLDERS DI KABUPATEN PASAMAN BARAT  
KECAMATAN SUNGAI BEREMAS**

**Melliana<sup>1b</sup>, Fitri Eriyanti<sup>1</sup>**

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

[mellia990@gmail.com](mailto:mellia990@gmail.com),

**Abstract**

This research was conducted with the aim of explaining the inhibiting factors empowering fishermen in West Pasaman District, Sungai Beremas District. The type of approach in this study uses a descriptive qualitative approach and uses data collection techniques, observation documentation studies and interview results.. The informants of this guide are in the form of structured questions and documentation. Test the validity of this data using the triangulation technique of data sources and methods. The data analysis technique uses three stages, namely the data reduction stage, the data presentation stage, and the conclusion drawing stage. The results of this study are the inhibiting factors in empowering fishermen in West Pasaman District, Sungai Beremas District. The research findings indicate that the inhibiting factor in empowering fishermen in West Pasaman Regency, Sungai Beremas District. are the provision of a budget that has not been optimal, limited human resources, limited regulations governing the empowerment of fishermen, not yet achieved the provision of facilities and infrastructure assistance by the Fisheries Service as Stakeholders, lack of training and guidance provided to fishermen, as well as stakeholders (wali nagari) difficulties in set fishermen

**Keyword : Inhibiting Factors, Empowerment, Stakeholders, Fishermen**

**Abstrak**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan Faktor Penghambat dalam pemberdayaan nelayan di Kabupaten Pasaman Barat Kecamatan Sungai Beremas. Jenis pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptifserta menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumentasi, observasi dan hasil wawancara. Informan pedoman ini berupa pertanyaan terstruktur dan dokumentasi. Uji validitas data ini menggunakan teknik triangulasi metode dan sumber data. Teknik analisis data menggunakan tiga tahap yaitu tahap reduksi data, tahap penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah Faktor Penghambat dalam pemberdayaan nelayan di Kabupaten Pasaman Barat Kecamatan Sungai Beremas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Faktor penghambat dalam melakukan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Pasaman Barat Kecamatan Sungai Beremas. adalah pemberian anggaran yang belum optimal, keterbatasan sumber daya manusia, Terbatasnya Regulasi yang mengatur tentang Pemberdayaan nelayan, Belum tercapainya Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana Oleh Dinas Perikanan sebagai *Stakeholders*, kurangnya pelatihan dan pembinaan yang diberikan kepada nelayan, serta *stakeholders* (wali nagari) kesulitan dalam mengatur nelayan.

**Kata Kunci : Faktor Penghambat, Pemberdayaan, Stakeholders, Nelayan**

## Pendahuluan

Pemberdayaan adalah suatu cara yang dilakukan untuk memberikan kesempatan dan kompetensi kepada sekelompok masyarakat miskin agar bisa dan berani untuk mengeluarkan ide, pendapat serta gagasan gagasannya, juga memiliki kompetensi dan keberanian dalam hal memilih suatu hal yang baik buat diri sendiri, keluarga juga baik untuk masyarakat. Sementara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 Pasal 1 ayat 2 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan yang berisi bahwa perlindungan nelayan adalah segala cara yang dilakukan untuk membantu masyarakat nelayan dalam segala permasalahan yang menyangkut kesulitan dalam melakukan usaha perikanan. Sedangkan pemberdayaan nelayan adalah segala cara yang dilakukan untuk mampu meningkatkan kompetensi masyarakat nelayan untuk melakukan usaha perikanan secara lebih baik.

Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas memiliki panjang garis pantai sekitar 72,56 Kilometer yang merupakan lokasi dengan garis pantai terpanjang di Kabupaten Pasaman Barat. Pada umumnya di wilayah pesisir pantai Air Bangis didominasi oleh Nelayan kecil yang memiliki kehidupan mayoritas hampir sama. Penduduk di Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas pada umumnya memiliki pekerjaan sebagai nelayan. Nelayan di Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat masih berada pada kelas sosial rendah dan masih dikategorikan sebagai nelayan miskin. Tempat tinggal nelayan di pesisir pantai Air Bangis masih berukuran kecil, sederhana dan masih terbuat dari bahan dasar kayu.

Nelayan di Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat Kecamatan Sungai Beremas menggunakan Perahu untuk melaut mencari ikan. Nelayan juga mendapatkan bantuan berupa mesin, jaring dan perahu dari Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat. Kegiatan para nelayan sepulang melaut adalah duduk-duduk di warung dan bermain game sampai sore, Para nelayan di Air Bangis juga masih minim ilmu pengetahuan masyarakat nelayan ini disebabkan karena tingkat pendidikan masyarakat nelayan yang masih dikategorikan kurang atau rendah. Oleh karena itu sangat diperlukan *stakeholders* yang berperan dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat nelayan di Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas. Adapun *stakeholders* yang bertugas dalam melakukan pemberdayaan nelayan adalah Dinas Perikanan, Balai Penyuluhan Perikanan, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Kecamatan Sungai Beremas, Wali nagari, Tuo Pasie serta masyarakat nelayan.

Pelaksanaan merupakan tindak lanjut dari suatu program dengan melalui proses rangkaian kegiatan atau kebijakan yang telah ditetapkan, untuk mencapai sasaran dari program maka diperlukan beberapa hal yaitu pengambilan sebuah keputusan, langkah-langkah strategis ataupun operasional atau kebijakan yang menjadikenyataan (Abdullah, 2014:151). Pelaksanaan dalam program pemberdayaan masyarakat nelayan yang dilakukan oleh stakeholders memiliki faktor penghambat baik dari peran stakehoders itu sendiri maupun dari masyarakat nelayan. Hal ini dikarenakan apabila masyarakat nelayan memiliki tingkat kesadaran dan kepribadian yang baik maka akan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat nelayan.

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor penghambat oleh stakeholders dalam melaksanakan pemberdayaann nelayan di Kabupaten Pasaman Barat Kecamatan Sungai Beremas. Dari hasil penelitian terbukti bahwa terdapat beberapa faktor penghambat oleh stakeholders dalam melakukan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Pasaman

Barat Kecamatan Sungai Beremas, sehingga kegiatan yang sudah diterapkan belum mengalami perkembangan sesuai dengan tujuan dan sasarannya.

### **Metode Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat Kecamatan Sungai Beremas. Adapun informan dari penelitian ialah terdiri dari Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat, Balai Penyuluhan Perikanan, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kecamatan Sungai Beremas, Wali Nagari Air Bangis, Tuo Pasia serta masyarakat nelayan. Informan penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data melalui observasi, studi dokumentasi dan hasil wawancara dengan berbagai informan penelitian. Uji keabsahan data dilakukan dengan cara menggunakan teknik triangulasi sumber dan juga metode. Sementara analisis data dilakukan dengan cara metode deskriptif yaitu reduksi data, tahap penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### **Hasil Dan Pembahasan**

#### **1. Faktor Penghambat Dalam Pemberdayaan Nelayan oleh Stakeholders di Kabupaten Pasaman Barat Kecamatan Sungai Beremas**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti berpedoman pada teori yang dikemukakan oleh Hansen dan Mowen 2016, untuk melihat faktor penghambat dalam melakukan pemberdayaan nelayan. Berikut hasil temuan peneliti dilapangan terkait Faktor Penghambat dalam pemberdayaan nelayan oleh stakeholders di Kabupaten Pasaman Barat Kecamatan Sungai Beremas:

##### **1. Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat**

Dinas Perikanan selaku *stakeholders* sudah melakukan semua tugas dan perannya dalam pemberdayaan nelayan, namun pelaksanaannya belum optimal. Adapun yang menjadi Faktor penghambat Dinas Perikanan selaku *stakeholders* dalam melakukan pemberdayaan nelayan di Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat, yaitu sebagai berikut :

##### **1.1. Pemberian anggaran yang belum optimal**

Anggaran merupakan rencana keuangan yang melihat bahwa seberapa besar biaya yang telah direncanakan, dan seberapa banyak serta bagaimana cara mendapatkan uang untuk membiayai rencana yang telah dibuat. (Mardiasmo (2010:2)). Salah satu yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan suatu program pemberdayaan masyarakat nelayan adalah anggaran. Hal ini dikarenakan bahwa anggaran merupakan bagian penting dalam setiap kegiatan yang ada dalam lembaga pemerintahan. Dana yang diperoleh di dapatkan dari dana pusat yaitu APBN, dari DAK-DAUDKP Provinsi dan sumbangan pihak ketiga yang sah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang sedang berlaku. Anggaran yang terbatas adalah salah satu permasalahan yang sering terjadi. Pemberdayaan nelayan tidak akan berjalan dengan semestinya dan tidak akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat nelayan.

Stakeholders dalam melaksanakan proses pemberdayaan nelayan di kecamatan sungai beremas, *stakeholders* terkendaladengan keterbatasan anggaran yang dimiliki. Hal ini disebabkan oleh, anggaran tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan nelayan yang jumlahnya

mencapai ribuan di Kabupaten Pasaman Barat. Sehingga banyak dari nelayan merasa tidak diperhatikan oleh *stakeholders* karena belum bisa mengurangi kemiskinan nelayan.

Hal ini sesuai dengan penelitian Slamet Hariyanto 2014, bahwa salah satu faktor penghambat internal dalam melakukan pemberdayaan masyarakat nelayan di Pantai Prigi Kabupaten Trenggalek Watimulo adalah keterbatasan anggaran. Dimana temuan penelitiannya adalah bahwa kemiskinan nelayan belum dapat diatasi karena dana yang dianggarkan belum tepat sasaran. Artinya bahwa setiap kegiatan program pemberdayaan nelayan di laksanakan, hanya sebagian orang tertentu yang menerima bantuan, sehingga mengakibatkan hanya sebagian masyarakat nelayan yang dapat menikmati program yang diberikan. Sementara masyarakat nelayan yang belum mendapat bantuan tetap pada posisi belum berdaya.

## 1.2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan pendapat Purwanto (2005:141), sumber daya manusia merupakan salah satu sumber yang penting. Hal ini dikarenakan bahwa perusahaan yang memiliki teknologi yang modern tidak akan ada artinya jika perusahaan tersebut memiliki sumber daya manusia yang tidak memiliki kompetensi, skill dan tanggung jawab, begitupun sebaliknya.

Dilihat dari sisi Sumber daya Manusia pegawai yang dimiliki oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat yang terbatas begitu juga sumber daya yang dimiliki oleh Badan Penyuluh Perikanan, tentunya akan mengakibatkan Dinas perikanan merasa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan nelayan dan nelayan yang jumlahnya juga mencapai puluhan ribu.

Dinas Perikanan selaku *stakeholders* dalam melakukan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Pasaman Barat belum optimal dalam melakukan pemberdayaan nelayan, hal ini disebabkan oleh sumber daya manusia yang ada pada Dinas Perikanan memiliki jumlah yang kurang begitu juga dengan sumber daya manusia pada Badan Penyuluh Perikanan sehingga menyebabkan Dinas perikanan dan penyuluh perikanan merasa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat nelayan.

Sesuai dengan penelitian Yemima zebua, 2017. Dengan temuan menjelaskan bahwa salah satu yang menjadi penghambat dalam pemberdayaan nelayan di Pesisir Pantai Sri Mersing adalah kualitas sumber daya manusia yang sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh masyarakat nelayan memiliki tingkat pendidikan yang rendah sehingga mengakibatkan rendahnya produktivitas dan pendapatan masyarakat nelayan

## 2. Terbatasnya Regulasi yang mengatur tentang Pemberdayaan nelayan

Salah satu yang menjadi faktor penghambat dalam melakukan pemberdayaan nelayan adalah keterbatasan regulasi yang dijadikan sebagai pedoman. Selama ini belum ada peraturan daerah yang khusus mengatur tentang pemberdayaan masyarakat nelayan, dan hanya menggunakan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat sebagai dukungan kelembagaan dinas yang khusus membidangi pemberdayaan nelayan.

Peraturan yang mengatur mengenai pemberdayaan nelayan di Kabupaten Pasaman Barat belum ada yang berlaku umum, Sehingga belum bisa mengatasi permasalahan dan kebutuhan

nelayan, dan juga berpatokan kepada Undang-Undang yang berlaku secara nasional untuk dijadikan pedoman bagi pemberdayaan masyarakat nelayan di Kabupaten Pasaman Barat.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kaswandi 2017, Hasil temuan peneliti adalah regulasi yang mengatur tentang pemberdayaan nelayan di Kabupaten Takalar masih menggunakan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 dan peraturan per undang-undangan yang berlaku secara nasional sehingga pemberdayaan masyarakat nelayan masih belum optimal dilakukan.

### **3. Belum tercapainya Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana**

Salah satu yang menjadi faktor penting dalam proses pemberdayaan nelayan di Kabupaten Pasaman Barat Kecamatan Sungai Beremas adalah Bantuan Sarana dan Prasarana. Dinas Perikanan memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada masyarakat nelayan belum memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat nelayan. Sehingga membuat proses pemberdayaan nelayan belum berjalan secara optimal.

Pemberian bantuan sarana dan prasarana oleh *stakeholders* belum optimal di lakukan. Hal ini dikarenakan oleh keterbatasan anggaran yang dimiliki, sehingga menyebabkan masih banyak keluhan dari masyarakat nelayan. Sesuai dengan penelitian oleh Windasai tahun 2021. Dengan temuan penelitian, pemberdayaan nelayan di Kabupaten Sumenap Kepulauan Masalembu belum optimal dilaksanakan. Hal ini dilihat dari fasilitas yang diberikan masih belum tercapai seperti fasilitas pada jaringan internet yang masih belum ada serta jarak wilayah yang jauh dari Kabupaten Sumenap sehingga sangat sulit dalam melakukan pemberdayaan nelayan.

### **4. Badan Penyuluh Perikanan Kabupaten Pasaman Barat**

Balai penyuluhan perikanan selaku *stakeholders* dalam pemberdayaan nelayan sudah melakukan tugas dan perannya dalam bidang penyuluhan dan pembinaan terhadap nelayan, namun belum optimal dikarenakan karena kendala sebagai berikut :

#### **4.1. Kurangnya pelatihan dan pembinaan yang diberikan kepada nelayan**

Pembinaan dan pelatihan merupakan strategi *stakeholders* dalam upaya pemberdayaan nelayan di Kabupaten Pasaman Barat Kecamatan Sungai Beremas. Badan Penyuluh Perikanan berkewajiban dalam melakukan pembinaan dan pelatihan sesuai dengan tupoksinya. Dalam hal ini, pelatihan dan pembinaan yang dilakukan pada nelayan Kecamatan Sungai Beremas masih kurang dikarenakan keterbatasan anggaran yang dimiliki dan minimnya sumber daya manusia penyuluh yang turun ke lapangan.

*Stakeholders* di Kabupaten Pasaman Barat yaitu Badan Penyuluh Perikanan Kabupaten Pasaman Barat selaku *stakeholders* dalam melakukan pemberdayaan nelayan di Kecamatan Sungai Beremas dalam program pelatihan dan pembinaan belum maksimal dikarenakan adanya beberapa permasalahan seperti kurangnya anggaran serta minimnya sumber daya manusia penyuluh yang akan turun kelapangan.

#### **4.2. Kurangnya Jumlah Penyuluh Perikanan**

Balai Penyuluh Perikanan terkendala dengan Kurangnya jumlah penyuluh perikanan (SDM) sebagai *stakeholders* untuk memberikan penyuluhan dan pembinaan dalam bidang usaha perikanan. Akibatnya, terjadinya kekurangan SDM untuk memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat nelayan sehingga nelayan kurang paham terhadap pelatihan yang dilakukan. Penulis menemukan bahwa kurangnya jumlah penyuluh perikanan untuk melakukan pemberdayaan nelayan di Kecamatan Sungai Beremas. Hal ini karena banyaknya jumlah nelayan sehingga memerlukan sumber daya manusia yang maksimal.

## 5. Wali Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas

Wali nagari selaku *stakeholders* di Kecamatan sungai beremas sudah melakukan tugas dan peran dalam pemberdayaan nelayan. Namun sama dengan *stakeholders* yang lain, wali nagari juga memiliki faktor yang menghambat dalam melakukan pemberdayaan nelayan, yaitu sebagai berikut :

### 5.1. Budaya Masyarakat Nelayan

Budaya adalah kebiasaan masyarakat nelayan dalam kehidupan sehari-hari. Budaya atau pola hidup masyarakat nelayan di Kecamatan Sungai Beremas menjadi penghambat dalam melakukan pemberdayaan nelayan. Salah satu yang menjadi faktor penghambat dalam melakukan pemberdayaan nelayan di Kecamatan Sungai Beremas adalah pola hidup masyarakat atau budaya masyarakat yang masih rendah. Hal ini karena para nelayan belum bisa memanfaatkan waktu mereka dengan baik ke hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya maupun keluarganya. Berdasarkan data yang penulis temukan di lapangan hanya sedikit dari banyaknya masyarakat nelayan yang menggunakan waktunya untuk membantu istrinya dalam menjemur ikan asin dan juga memperbaiki jaring atau perahunya. Sesuai dengan penelitian Yemima zebua, 2017, temuan penelitian menjelaskan bahwa salah satu faktor penghambat dalam melakukan pemberdayaan nelayan yaitu salah satunya kebiasaan nelayan dalam hal pengelolaan keuangan yaitu adanya kebiasaan masyarakat nelayan yang pada saat hasil panen laut melimpah, mereka akan menghabiskan dengan cepat begitu pula ketika hasil panen laut berkurang.

## 6. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI Kecamatan Sungai Beremas)

Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam melakukan pemberdayaan nelayan oleh HNSI Kecamatan Sungai Beremas ini adalah sebagai berikut :

### 6.1. Kurangnya pengawasan oleh HNSI terhadap nelayan Air Bangis Kecamatan sungai beremas

Salah satu kendala dalam melakukan proses pemberdayaan masyarakat nelayan di Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas ini adalah kurangnya pengawasan oleh HNSI terhadap nelayan Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas. Sehingga mengakibatkan banyaknya terjadi permasalahan yang dilakukan oleh nelayan Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas.

## Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa Faktor penghambat dalam melakukan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Pasaman Barat Kecamatan Sungai Beremas yaitu Pemberian anggaran yang belum optimal, Keterbatasan sumber daya manusia, Kurangnyapelatihan dan pembinaan yang diberikan kepada nelayan, Terbatasnya Regulasi yang mengatur tentang Pemberdayaan nelayan, Belum tercapainya Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana, Budaya masyarakat nelayan, kurangnya jumlah penyuluh perikanan, serta kurangnya pengawasan oleh Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kecamatan Sungai Beremas terhadap nelayan Air Bangis.

### Daftar Pustaka

- Abdullah, M. 2014. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan*. Yogyakarta : Aswaja Pressindo.
- Hansen dan Mowen. 2016. *Akuntansi Manajerial*. Buku I Edisi 8. Jakarta:Salemba Empat
- Kaswandi. 2017. *Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kabupaten Takalar. Program Studi Ilmu Pemerintahan*. Universitas Hasanuddin.
- Karjuni dkk. 2021. *Collaborative Governance Sebagai Solusi Dalam Tata Kelola Pemberdayaan Nelayan*. Jurnal Sosio Informa Vol. 7 No. 02
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. UIP : Jakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiana. 2017. *Analisis Anggaran Dan Realisasi Dana Desa Pada Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin*.Jurnal Riset Terapan Akuntansi, Vol. 1 No. 1. Hal 35-42
- Nordiawan. 2010.*Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: SalembaEmpat.
- Purwanto. 2005. *Arti dan Peranan Sumber Daya Manusia*. Jurnal Ekonomi dan Pendidikan. Vol 2 No 2 Hal 136-145
- Slamet Hariyanto. 2014. *Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Pantai Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek*. Jurnal Universitas Tulungagung BONOROWO Vol. 2.No.1.
- Yemima Zebua. 2017. *Faktor Penyebab Rendahnya Tingkat Kesejahteraan Nelayan Pesisir Pantai Sri Mersing Desa Kuala Lama Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara*. Jurnal Geografi. Vol 9 No 1
- Windasai. 2021. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Kepulauan Masalembu Kabupaten Sumenep)*. Jurnal Inovasi Penelitian. Vol 2 No 3
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 Pasal 1 ayat 2 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan
- Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat mempunyai tugas pokok melakukan kewenangan disentralisasi dan tugas perbantuan di bidang perikanan



# JPGDE

**Journal Of Policy, Governance,  
Development and Empowerment**

e\_ISSN = 2797 - 9075  
p\_ISSN = 2797 - 9199

**Publisher :**  
Center for Policy and Development Studies  
Faculty of Social Science Universitas Negeri Padang